



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA

JL. PEMUDA NO. 55A MOJOSARI, MOJOKERTO 61382 JAWA TIMUR
TELP. (0321) 592192 FAX. (0321) 593581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR 188.45/ 19 /KEP/416-107/2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
30. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja periodik.
- KEDUA** : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB V : Penutup

LAMPIRAN

KETIGA : Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 17 September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 19 /KEP/416-107/2025
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025

URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.806.735.392		12.007.707.377		11.977.195.399		12.185.297.584		12.124.844.923	
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,76	4,15 - 3,60	4,14 - 3,42		4,13 - 3,23		4,05 - 3,09		4,00 - 3,01		3,95 - 2,96		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,30 (A)	81,45 (A)	81,50 (A)		81,55 (A)		81,60 (A)		81,65 (A)		81,70 (A)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					6.210.985.492		6.311.957.477		6.381.445.499		6.489.547.684		6.529.095.023	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	88,25	90	90	6.210.985.492	90	6.311.957.477	90	6.381.445.499	90	6.489.547.684	90	6.529.095.023	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00%	90,80%	90,81%		90,82%		90,83%		90,84%		90,85%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%	90%	90%	47.500.000	90%	47.500.000	90%	47.500.000	90%	47.500.000	90%	47.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.533.885.492		5.621.257.477		5.635.745.499		5.779.247.684		5.853.795.023		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	5.533.885.492	100%	5.621.257.477	100%	5.635.745.499	100%	5.779.247.684	100%	5.853.795.023		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 org/bln	33 org/bln	33 org/bln	5.529.570.182	33 org/bln	5.616.640.095	33 org/bln	5.630.804.901	33 org/bln	5.773.961.244	33 org/bln	5.848.138.532		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.315.310	1 dokumen	4.617.382	1 dokumen	4.940.598	1 dokumen	5.286.440	1 dokumen	5.656.491		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000				
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	86,15	86,16	35.000.000	86,17	35.000.000	86,18	35.000.000	86,19	35.000.000	86,20			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					194.900.000		194.900.000		197.900.000		202.900.000		202.900.000		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kantor sesuai standar														
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	65.000.000	6 Paket	65.000.000	6 Paket	65.000.000	6 Paket	70.000.000	6 Paket	70.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	100%	129.900.000	100%	129.900.000	100%	132.900.000	100%	132.900.000	100%	132.900.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	8 Paket	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	27.000.000	11 Paket	27.000.000	11 Paket	30.000.000	11 Paket	30.000.000	11 Paket	30.000.000		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah					238.200.000		247.800.000		247.800.000		257.400.000		257.400.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	100%	238.200.000	100%	247.800.000	100%	247.800.000	100%	257.400.000	100%	257.400.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	163.200.000	12 Laporan	172.800.000	12 Laporan	172.800.000	12 Laporan	182.400.000	12 Laporan	182.400.000		
Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemeruintah Daerah					161.500.000		165.500.000		217.500.000		167.500.000		167.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	100%	161.500.000	100%	165.500.000	100%	217.500.000	100%	167.500.000	100%	167.500.000		
Penyediaanaa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaanaa, Pajak dan Perizinan Kenaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	86.000.000	6 Unit	90.000.000	6 Unit	90.000.000	6 Unit	90.000.000	6 Unit	90.000.000		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	1 unit	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 Uniit	100.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	18 Unit	31 Unit	31 Unit	25.500.000	31 Unit	25.500.000	31 Unit	27.500.000	31 Unit	27.500.000	31 Unit	27.500.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	86,21%	86,50%	86,75%		87%		87,25%		87,50%		88%			
Program perencanaan tenaga kerja					50.000.000		150.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro di bidang Ketenagakerjaan	Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja		100%	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					50.000.000		150.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		
Tersedianya dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	50.000.000		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000				

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Penyusunan RencanaTenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		1 Orang	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja					775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000	
Meningkatnya Masyarakat/ Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian Dan Kemampuan Kerja	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	89,60%	92%	92,5%	775.000.000	93%	775.000.000	93,5%	775.000.000	94%	775.000.000	95%	775.000.000	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					695.000.000		695.000.000		695.000.000		695.000.000		695.000.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	48 Orang	96 Orang	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	80 Orang	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordina si dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	24 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	0 Orang	16 Orang	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000	
Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	0 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET		
			2025			2026		2027		2028		2029			2030	
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Kesepakatan an	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan an	40.000.000	1 Kesepakatan an	40.000.000	1 Kesepakatan an	40.000.000	1 Kesepakatan an	40.000.000	1 Kesepakatan an	40.000.000			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	0 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000			
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Meningkatnya Kualitas Produktivitas Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 Perusahaan an	4 Perusahaan an	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000			
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan an	4 Perusahaan an	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000	4 Perusahaan an	50.000.000			
Program penempatan tenaga kerja					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000			
Meningkatnya akses kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	15,50%	16,0%	16,5%	275.000.000	17%	275.000.000	17,5%	275.000.000	18%	275.000.000	19%	275.000.000			
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000			
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang	100%	100%	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	tercapai sesuai target														
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1 Orang	25 Orang	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000		
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	50 Orang	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000		
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000		
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Perlindungan PMI Kabupaten Mojokerto	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	35 Orang	35 Orang	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000		
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	35 Orang	35 Orang	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000		
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Administrasi Penerbitan Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi penerbitan perpanjangan IMTA yang tercapai sesuai target		100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Yang Divalidasi	0 SKRD	0 SKRD	0 SKRD	-	0 SKRD	-	0 SKRD	-	0 SKRD	-	0 SKRD	-	
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	1,50%	1,50%	1,45%		1,40%		1,35%		1,30%		1,25%		
Program hubungan industrial					4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900	
Menurunnya Angka Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	85,71%	86%	86,50%	4.495.749.900	87%	4.495.749.900	87,50%	4.495.749.900	88%	4.495.749.900	89%	4.495.749.900	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7%	11,7%	35%		35,5%		36%		36,5%		37%		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Persentase fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang		100%	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	tercapai sesuai target														
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		20 Perusahaan	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000		
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		20 Perusahaan	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota					4.425.749.900		4.425.749.900		4.425.749.900		4.425.749.900		4.425.749.900		
Meningkatnya Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20 Perkara	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	0 Perkara	20 Perkara	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000		
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	27930 Orang	27940 Orang	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	86,21%	86,50%	86,75%		87%		87,25%		87,50%		88%			
Program pembangunan kawasan transmigrasi					195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
Meningkatnya Penempatan Transmigran	Persentase calon transmigran yang ditempatkan			100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
Meningkatnya penataan persebaran penduduk dari daerah asal ke daerah penerima trans	Persentase kegiatan fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target			100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan			1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000		
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000		
Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran			3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000		
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi			1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000		
JUMLAH					12.001.735.392		12.202.707.377		12.172.195.399		12.380.297.584		12.319.844.923		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**== RENCANA STRATEGIS ==
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029
(INMENDAGRI RI NO. 2 TAHUN 2025)**



**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
▶ TAHUN 2025 ◀**

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
-- DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO --
TAHUN 2025-2029

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan ini menyatakan bahwa dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah dokumen resmi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang merupakan pedoman dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini juga akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pembangunan Ketenagakerjaan serta dasar pengukuran dan evaluasi kinerja berkaitan tugas pokok dan fungsi organisasi dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Mojokerto, September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680207 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan OPD.

Penyusunan Rencana Strategis OPD ini dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta untuk mengukur sampai sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi serta manajemen yang diprogramkan dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

Semoga penyusunan dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi landasan fundamental bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sehingga bisa meningkatkan kualitas kerjanya dimasa yang akan datang.

Mojokerto, September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680207 198809 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Dasar hukum penyusunan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	I. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	15
2.4	Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja	30
	II. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.5	Permasalahan pelayanan perangkat daerah.....	32
2.6	Isu strategis.....	34
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	III.1 TUJUAN DAN SASARAN	
3.1	Tujuan renstra PD/Provinsi/Kabupaten/Kota.....	39
3.2	Sasaran renstra PD/Provinsi/Kabupaten/Kota	39
3.3	Sasaran strategi perangkat daerah	44
3.5	Arah kebijakan perangkat daerah	45
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1	Uraian program	47
4.2	Uraian kegiatan	49
4.3	Uraian sub kegiatan, kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	59
4.4	Uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah	70
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) PD	70
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)	71
BAB V	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025-2029. Untuk periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan analisa dan perumusan sasaran kinerja Perangkat Daerah (PD) yang tersusun dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Analisa dan perumusan sasaran kinerja tersebut berdampak pada perubahan terhadap rencana strategis PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang meliputi Tujuan PD, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Program, Kegiatan dan Pendanaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka diamanatkan bahwa Renstra Disnaker Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang disusun harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan berpedoman kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 serta bersifat indikatif. Di samping itu, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 mengacu dan selaras dengan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja tahunan, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan Disnaker Kabupaten Mojokerto. [Berikut ini adalah Tabel keselarasan Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Prov. Jawa Timur dan RPJMD Kab/Kota:](#)

Tabel 1.1
KETERKAITAN RPJMN, RPJMD PROV. JAWA TIMUR DAN RPJMD KABUPATEN MOJOKERTO

RPJMN	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJMD KABUPATEN MOJOKERTO
VISI	VISI	VISI
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur
MISI	MISI	MISI
ASTACITA	NAWA BHAKTI SATYA	CATUR ABHIPRAYA MUBAROK
1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) untuk membangun fondasi bangsa yang kuat	1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.	2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4. Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC)	
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	

RPJMN	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJMD KABUPATEN MOJOKERTO
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	7. Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.	
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8. Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga	
	9. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	

Keterkaitan misi pada level RPJMN, RPJMD Prov. Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Mojokerto, khususnya di bidang pembangunan ketenagakerjaan yaitu :

Tabel 1.2.
KETERKAITAN MISI PEMBANGUNAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

RPJMN	RPJMD Prov. Jawa Timur	RPJMD Kabupaten Mojokerto
Misi 3	Misi 2	Misi 3
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.	Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera

Penyusunan dokumen Renstra ini juga berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Tenaga Kerja sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten MojokertoTahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana

Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal](#);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. [Insruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat \(Germas\)](#);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;](#)
20. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;](#)
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;](#)
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto
27. [Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;](#)

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Terpilih Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif PD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;

- 4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Imendagri) No. 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN :

- 1.1. Latar belakang
Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra dan sistematika penulisan Renstra;
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
Memuat Peraturan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Penjelasan tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang dikaitkan dengan RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati Terpilih, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target pembangunan ketenagakerjaan.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Berisikan urutan terstruktur dalam penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Tenaga Kerja sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang

2.4. kelompok sasaran layanan

Berisi kelompok sasaran (konsumen) pelayanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.

II. Permasalahan dan isu strategis

a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah

b. Isu Strategis

3. BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3.2. Sasaran renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3.3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

4. BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian program;

4.2. Uraian kegiatan;

4.3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah;

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

5. Bab V. PENUTUP.

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

1.A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan penjelasan sebagai berikut:

➤ KEPALA DINAS

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja

➤ SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

- f. Pengordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN, Mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. SUB BAGIAN KEUANGAN, Mempunyai tugas :
 - a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
 - b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - d. Menyusun laporan keuangan;
 - e. Menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas di bidang keuangan;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

➤ **BIDANG PELATIHAN**

- 1) Bidang Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja yang meliputi uji ketrampilan dan sertifikasi, pelatihan ketenagakerjaan serta bina lembaga pelatihan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan lembaga lain dalam pelaksanaan Uji Keterampilan Kerja (UKK), dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - c. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - d. Pelaksanaan uji keterampilan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - e. Pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - f. Pelaksanaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
 - g. Pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja meliputi pembinaan program latihan, pembinaan pengelola dan pembinaan prasarana dan sarana lembaga pelatihan kerja;
 - h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja swasta;
 - i. Pelaksanaan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja di perusahaan;
 - j. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan peningkatan produktifitas;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ **BIDANG PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

- 1). Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. Perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan informasi pasar kerja;
 - c. Pelaksanaan bursa kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan antar kerja dalam negeri dan luar negeri;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan lembaga penempatan tenaga kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)
 - f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengendalian dan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. Pelaksanaan dan fasilitas program penciptaan dan perluasan kesempatan kerja;

- h. Pelaksanaan fasilitas transmigrasi;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Perluasan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- 1). Seksi Transmigrasi, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan fasilitasi pelaksanaan transmigrasi yang meliputi informasi, pendaftaran dan seleksi, verifikasi, perpindahan, dan pembinaan pasca penempatan;
 - b. Menyusun bahan penyiapan, pendaftaran serta pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi;
 - c. Melakukan penyebaran informasi, sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan program perpindahan dan penempatan transmigrasi;
 - d. Melakukan pendataan animo calon transmigrasi;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama antara daerah dengan daerah tujuan transmigrasi;
 - f. Melakukan peninjauan calon lokasi transmigrasi;
 - g. Melakukan pendampingan dan pengawalan transmigran ke daerah tujuan;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan sosial ekonomi transmigran pasca penempatan;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

➤ **BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL**

- 1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi persyaratan kerja dan pengupahan, kelembagaan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dokumen syarat kerja dan pengupahan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perusahaan penyedia jasa pekerja serta pemborongan pekerjaan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit dan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
- e. Pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh;
- f. Pelaksanaan pelayanan perselisihan hubungan industrial;
- g. Pelaksanaan deteksi dini, mogok kerja, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan syarat kerja dan norma kerja di perusahaan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ **BIDANG PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA**

- 1) Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi monitoring prasarana dan sarana, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan jaminan sosial;
- 2) Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan monitoring perlindungan norma ketenagakerjaan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi dan/ atau pengesahan terhadap obyek perlindungan ketenagakerjaan;
 - d. Pelaksanaan dan memfasilitasi penerapan pembinaan perlindungan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap penggunaan sarana dan prasarana obyek perlindungan ketenagakerjaan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi pelatihan serta pengembangan perlindungan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/ buruh;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

➤ **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- 3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk sub koordinator

1.B. SUMBER DAYA DINAS TENAGA KERJA

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai menurut penempatannya:

NO	PENEMPATANNYA	PRIA	WANITA
1	KEPALA DINAS	1	-
2	SEKRETARIS DINAS		1
3	BAG. SEKRETARIAT	6	3
4	BID. PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	2	2
5	BID. PELATIHAN	2	2
6	BID. HUBUNGAN INDUSTRIAL	3	1
7	BID. PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA	3	1
	JUMLAH	17	10

b. Jumlah pegawai menurut jabatannya:

NO	JABATAN	PRIA	WANITA
1	KEPALA DINAS	1	-
2	SEKRETARIS DINAS	-	1
3	KEPALA BIDANG	4	-
4	KASUBAG / KASIE	-	3
5	JABATAN FUNGSIONAL	5	3
6	STAF	7	3
	JUMLAH	17	10

c. Jumlah pegawai menurut golongan:

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	15
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
	JUMLAH	27

d. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca sarjana	8
2	Sarjana / D3	13
3	SMA	6
4	SMP	-
5	SD	-
	JUMLAH	27

Sampai dengan tahun 2024, keseluruhan komposisi pegawai pada dinas tenaga kerja terjadi dinamika perubahan secara fluktuatif, terutama pada ketersediaan pegawai tingkat staf yang diisi golongan 2 (dua) dan 3 (tiga). Diharapkan adanya perubahan-perubahan ini tidak mempengaruhi secara negatif, namun dapat berdampak positif pada peningkatan capaian kinerja prioritas pembangunan ketenagakerjaan

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Barang Inventaris Kantor (BM)

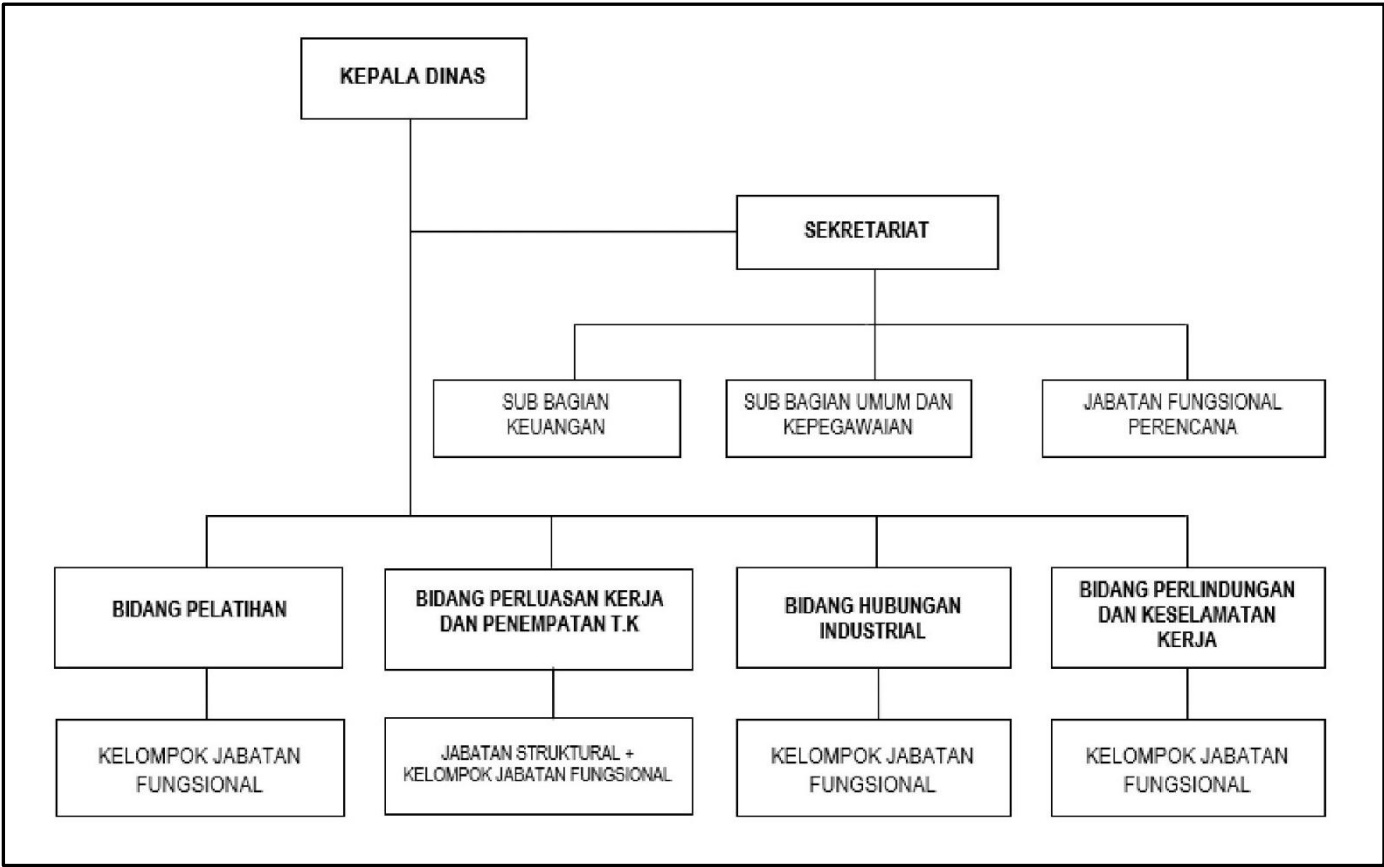
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	
	Tanah	0 m ²
2	Peralatan dan Mesin	
	Alat-alat Angkutan	
	- Roda 4	4 unit
	- Roda 2	2 unit
	Alat kantor	48 unit
	Alat rumah tangga	88 unit
	Meja dan kursi kerja	52 unit
	Alat Studio	11 unit

NO	URAIAN	JUMLAH
	Persenjataan non senjata api	1 unit
	Komputer Unit	15 unit
	Peralatan Komputer	33 unit
3	Gedung dan Bangunan	
	Aula/ Gedung	286 m ²
	Kantor	615 m ²
	Kamar Mandi	143 m ²
	Gudang kantor	33.08 m ²
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	200 m ²
5	Aset tidak berwujud	
	Software	1 Unit

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana berikut ini :

GAMBAR BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Sebagaimana yang tertuang di dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih pada periode 2021-2026, dengan Indikator Tujuan Perangkat Daerah adalah “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), maka dilakukan langkah-langkah prioritas untuk penanganan penurunan angka pengangguran. Berdasarkan data Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kabupaten Mojokerto, didapatkan angka pencapaian penurunan angka pengangguran selama periode tahun 2021-2024 yaitu :

TABEL.

KONDISI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2024

NO	URAIAN	TAHUN				KET
		2021	2022	2023	2024	
1	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS	897.979	906.653	893.299	908.607	
	A. ANGKATAN KERJA	632.808	646.778	647.752	671.806	
	a. Bekerja (AK. Tertampung)	597.775	615.557	617.533	645.825	
	b. Tidak bekerja (Pengangguran terbuka)	35.033	31.221	30.219	25.981	
	B. BUKAN ANGKATAN KERJA	265.171	259.875	245.547	236.801	
2	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) A/1 X 100 (%)	70,47	71,34	72,51	73,94	
3	TARGET TPT RPJMD + RENSTRA KAB. MOJOKERTO 2025-2029	5,62	5,42	5,09	4,76	
4	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) b/A X 100 (%) (BPS)	5,54	4,83	4,67	3,87	
6	RASIO TINGKAT KESEMPATAN KERJA a/A*100 (%)	94,46	95,17	95,33	96,13	
7	RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA a/1*100 (%)	66,57	67,89	69,13	71,08	
	-- FORMULASI --					
1	ANGKATAN KERJA	JUMLAH ORANG BEKERJA + JUMLAH ORANG TIDAK BEKERJA (PENGANGGURAN)				
2	BUKAN ANGKATAN KERJA	SUDAH JELAS				
3	PENDUDUK USIA 15 TH KEATAS	JUMLAH ANGKATAN KERJA + JUMLAH BUKAN ANGKATAN KERJA				
4	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	JUMLAH ANGKATAN KERJA / JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TH X 100				
5	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	JUMLAH ORANG TIDAK BEKERJA (PENGANGGURAN) / JUMLAH ANGKATAN KERJA X 100				
6	RASIO TINGKAT KESEMPATAN KERJA (TKK)	JUMLAH PENDUDUK BEKERJA / JUMLAH ANGKATAN KERJA X 100				
7	RASIO PENDUDUK BEKERJA	JUMLAH PENDUDUK BEKERJA / JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TH X 100				

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024

Pada tabel diatas didapatkan bahwa angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto terjadi penurunan pada setiap tahunnya, hasil ini adalah gambaran positif terkait upaya-upaya dari Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sektor urusan ketenagakerjaan, bekerja sama dengan stakerholder lintas Perangkat

Daerah pendukung dalam pelaksanaan program-program prioritas peningkatan kemampuan ekonomi melalui indikator-indikator pencapaian antara lain:

- 1. Persentase penyerapan tenaga kerja;
- 2. Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten;
- 3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
- 4. Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial.

Berikut ini adalah tabel hasil pencapaian Indikator target, realisasi Target dan Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021-2026 (2021-2024):

Tabel TC. 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA (2021-2026)																						
1	Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten				85%	85%	85%	87%	90%	90%	85,2 0%	85,0 6%	85,2 1%	89,6 0%		100, 24	100, 07	100, 25	102, 99			
2	Persentase penyerapan tenaga kerja				82%	82%	84%	84%	85%	86%	82,0 9%	82,1 0%	84,8 3%	86,2 1%		100, 11	100, 12	100, 99	102, 63			
3	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan				6%	6%	5%	5%	4%	4%	2,25 %	2,15 %	2,25 %	1,50 %		37,5 0	35,8 3	45,0 0	30,0 0			
4	persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial				50%	51%	51%	52%	52%	53%	54,7 2%	55,4 7%	85,8 4%	87,0 2%		109, 33	108, 76	168, 31	167, 35			

Secara Umum pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam pembangunan Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2021-2026 (pelaksanaan Tahun 2021-2024) sudah baik, namun tentunya hal tersebut tidak luput dari hambatan dan tantangan yang bisa terjadi dalam pelaksanaannya. Dalam hal pelayanan terhadap para pelaku industri, masyarakat dan pencari kerja adalah kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Tenaga Kerja yang memberikan pelayanan sesuai kriteria dan kualifikasi yang diharapkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri tergantung dari kebijakan dari Kepala Daerah terkait ketersediaan pegawai sehingga walaupun target bisa berhasil tercapai dan bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target capaian, akan tetapi pelaksanaan tahapannya masih terdapat permasalahan.

Kedua adalah problematika ketersediaan anggaran yang masih belum tersedia sesuai perencanaan yang diharapkan dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Daerah serta Kebijakan-kebijakan yang menyertainya sehingga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PD.

Berikut ini adalah analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Indikator persentase penyerapan tenaga kerja

Pelaksana pada indikator ini Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Pada Tahun 2021-2024 Indikator Persentase penyerapan tenaga kerja melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini tidak terlepas dari upaya optimalisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri antara lain :

- a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Pengelolaan informasi pasar kerja dan;
- c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/ Kota);

Dampak faktor keberhasilan tersebut tercermin pada tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya yaitu terletak pada animo masyarakat akan program transmigrasi, Penyuluhan Bursa Kerja, Job Fair dan CPMI sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 82%, dapat dicapai sebesar 82,09%. Perkembangan peningkatan ini berjalan sampai dengan tahun 2024 dengan pencapaian signifikan sebesar 86,21% dengan target 84%. Keberhasilan ini juga melalui optimalisasi kerjasama dengan sekolah-sekolah tingkat menengah kejuruan (SMK) yang memiliki perangkat sarana Bursa Kerja Khusus (BKK), sehingga pihak sekolah, dinas tenaga kerja dan pengusaha saling mengetahui kebutuhan persyaratan kerja yang diinginkan terkait skill,

kemampuan dan keahlian kerja, serta para murid yang bersekolah dapat langsung diarahkan ke bidang pekerjaan yang tersedia.

Sedangkan faktor hambatan pada indikator ini adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pegawai fungsional pengantar kerja untuk mensinkronisasikan ketersediaan calon tenaga kerja dengan kualifikasi dan persyaratan yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerja sehingga kerap terjadi keterlambatan pemenuhan pencari kerja yang tidak dapat langsung ditangani dan diintegrasikan dengan pihak pemberi kerja.

2. Indikator peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten

Faktor keberhasilan indikator kinerja utama Peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten pelaksanaan antara lain :

- a. pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi;
- b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- d. [Pemberdayaan dan koordinasi kelembagaan Pelatihan Vokasi.](#)

Dimana hal ini tidak terlepas dari pengembangan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pelatihan Kerja tingkat swasta, [Balai Latihan Kerja Komunitas \(BLKK\)](#), [Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas \(BPVP\) Sidoarjo](#) dan perusahaan yang terdapat di Kabupaten Mojokerto. Faktor Keberhasilan ini juga tercapai berkat optimalisasi pelaksanaan pelatihan yang berbasis Kompetensi dan sertifikasi memberikan daya dorong bagi masyarakat dan atau pencari kerja di Kabupaten Mojokerto untuk memiliki kapasitas daya saing dalam keahlian dan kemampuan kerja. Pengembangan Sarana dan prasarana juga berkaitan dengan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja sehingga diharapkan instruktur-instruktur pelatihan dapat mempunyai keahlian yang lebih dalam transfer knowledge.

Sedangkan Faktor hambatan adalah antara lain :

1. [Kurangnya koordinasi/kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pelatihan Kerja Tingkat Swasta / Perusahaan Balai Latihan Kerja Komunitas \(BLKK\) perusahaan yang terdapat di Kabupaten, Balai Latihan Kerja \(BLK\) Propinsi Jawa Timur dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas \(BPVP\) Sidoarjo;](#)
2. [Kurangnya standar akreditasi program-program pelatihan yang dimiliki oleh Lembaga-lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan, Balai Latihan Kerja Komunitas \(BLKK\) di Kabupaten Mojokerto; dan](#)
3. [belum adanya restrukturisasi/perubahan kurikulum jenis-jenis pelatihan diantaranya Pelatihan Vokasi dan/ atau Pelatihan Vokasi berbasis pondok pesantren, dalam kondisi saat ini yang mampu menumbuhkan minat masyarakat dalam meningkatkan skill atau](#)

kemampuan dalam persaingan pasar kerja sehingga dapat menyebabkan pelatihan-pelatihan kerja yang tersedia belum terisi secara maksimal.

Untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan kerja di wilayah Kabupaten Mojokerto, berikut ini adalah tabel daftar Lembaga Pelatihan Kerja tingkat swasta, Perusahaan dan BLK Komunitas yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto :

Tabel
DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN

NO	NAMA LPK PERUSAHAAN	KEJURUAN
1	PT. Long Soon	Mekanik Logam
2	CV. Hasil Karya	Operator Mesin Paku
3	PT. Java Paperindo Utama Industries	Operator Mesin Kertas
4	PT. Pabrik Kertas Indonesia	Operator Mesin Kertas
5	PT. Second Best Packing	Procesing
6	PT. Surabaya Autocomp Indonesia	Operator Mesin Harres
7	PT. Kurnia Anggun	Operator Mesin Kayu
8	PT. King Halim Jewellery	Kerajinan Perhiasan
9	LPP PT. Ittihad Rahmat Utama	Push Cutter
10	LPK PT. Betts Indonesia	Production Tube
11	LLP MPS KUD Tani Bahagia	Produksi Sigaret
12	LLP PT. Mitra Anugrah Gemilang	Mesin Produksi Furniture
13	LLP PT. Sopanusa Tissue dan Packaging	Supervisi
14	PT. Marufuji Kenzai	Meubelair
15	LPP PT. Kurnia Anggun Unit II	Assemblingan Kayu
16	LPK Toyota Training Centre (PT. Toyota Astra Motor)	Pelatihan Teknisi, Frontline Training, Pelatihan Manajemen
17	LPK PT. Pamitramas Mulia	Kerajinan Perhiasan
18	LPK RS. Sidowaras	Keperawatan, Nakes Lain, Non Nakes
19	LPK PT. Bambang Djaja	Operator Produksi (Travo)
20	LPK PT. Lautann Natural Krimerindo	Digital Marketing
21	LPK PT. Sky Indonesia	Operator Produksi (Skyrail)

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel
DAFTAR LPK SWASTA DAN BLK KOMUNITAS

NO	NAMA LPK PERUSAHAAN	ALAMAT	INSTRUKTUR	KEJURUAN
1	LPKS Management and Business Education	Jl. Raden Wijaya No. 07 Mojokerto	12	Perhotelan, Kom, Adm Kantor, Komputer, Kom, Akun, Perpajakan
2	LPKS MPU Tantular	Jl. Gajah Mada No. 11 , Mojosari - Mojokerto	2	Komputer
3	LPKS Institut Pembangunan (IP)	Jl. Pahlawan Desa Awang-awang, Mojosari - Mojokerto	2	Komputer, Bhs. Inggris
4	LPKS Al Anwar College Medical and Managerial Program (Alcomena)	Jl. Raya Brangkal, Kedungmaling III RT 023, Brangkal - Sooko	2	Komputer, Akuntansi
5	LPKS Bina Insani Firaas	Jl. Syech Jumadil Kubro, Desa Sentono Rejo, Trowulan	6	Komputer, Akuntansi
6	LPKS Media Prima	Desa Kupang RT 001/ RW 003 Jetis	5	Komputer
7	LPKS Fuji Bijak Prestasi	Jl. Wonosari, Ngoro - Mojokerto	18	Metodologi Pelatihan Kerja
8	LPKS Sanggar Bhagaskara	Jalan Kebudayaan 3 Bejjang Trowulan	1	seni budaya, pariwisata dan industri kreatif
9	LPKS Gema Surya Majapahit Institute	Desa Pakis RT 001/ RW 003 Trowulan	7	Kerajinan Fiberglass, Pupuk Organik, Pakan ternak, budidaya pertanian
10	LPKS Al Hidayah	Desa Manduro, Ngoro, Mojokerto	4	Komputer, Tata boga
11	LPKS Fedora Computer Education (FCE)	Jl. Kartini No 11 Mojosari - Mojokerto	2	komputer
12	LPKS PKBM Roudlotul Hidayah	Desa Pakis Wetan RT 001 / RW 003 Desa Pakis, Trowulan	2	Komputer, Menjahit
13	LPKS LPP Sabilillah	Desa Watanmas Jedong RT 49 / RW 05 Ngoro, Mojokerto	3	Komputer, Hantaran, Handycraft
14	LPKS Khadijah English Course (KENS)	Jl. Sukarsono 139 Desa Gembongan, Gedeg	3	Bahasa inggris, komputer
15	LPKS Modes Srikandi	Jl. Garuda 118 Dusun Lontar RT 026/RW 006 Mojosasi	3	Tata busana, teknik bordir sulam
16	LPKS Sekolah Herbal Muslim (SHM)	Jl. Pendidikan Desa Sumbertembu, Kec. Bangsal	7	Keterampilan herbal, kesehatan tradisional
17	LPKS Modes Surya Buana	Desa windurejo RT 002/RW 009 Kutorejo	4	Menjahit, tata busana
18	LPKS Nagasaki	Desa Watukenongo, RT 002/RW 006 Pungging	3	bahasa jepang
19	LPKS Griya Kriya Indonesia	Perum Taman Kirana E-07, RT 001 / RW 013 Desa Banjaragung, Kec. Puri	4	Tata boga, merajut, kerajinan
20	BLK Komunitas Darul Hikmah	Jl. KH. Ismail No. 90 Kedungmaling, Brangkal - Sooko	1	komputer
21	BLK Komunitas Hidayatul Muwaffiq	Jl. KH Hasyim Asyari 08/02 Penompo, Jetis	1	Teknologi informasi
22	BLK Komunitas Sabilillah	Dusun Watusari, Desan Watanmas, Jedong, Ngoro	1	Menjahit
23	BLK Komunitas Majma'al Bahroin	Desa Mojogeneng, RT 014/RW 003 Kec. Jatirejo	2	Pengolahan hasil pertanian
24	BLK Komunitas Riyadlul Quran	Jl. Raya Brangkal No. 991, Kedungmaling, Sooko	2	Teknologi informasi

NO	NAMA LPK PERUSAHAAN	ALAMAT	INSTRUKTUR	KEJURUAN
25	LPK Sora Gakkou	Dusun Pesanan RT 002/ RW 002 Desa Bicak, Trowulan	1	Bahasa Jepang
26	Yayasan Islam Darul Hikmah	Jl. Kamas Setyoadi, Gang I Nomor 136, Kedungmaling, Sooko - Mojokerto	1	Desain Komunikasi Visual
27	PCNU Mojokerto	Jl. RA Basuni Nomor 9 Desa Japan, Sooko	1	Desain Komunikasi Visual
28	Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Sabilul Muttaqin Bareng	Jl. Raya Bareng, Desa Talok, Dlanggu - Mojokerto	1	Pengolahan hasil pertanian
29	Yayasan Al - Ittihad Tawangsari	Desa Tawangsari RT 002 / RW 004, Trowulan	1	Desain mode dan tekstil
30	Yayasan Abdulloh Latief	Dusun Gemekan RT 002 / RW 004 Kecamatan Sooko	1	Desain mode dan tekstil
31	Lembaga Pendidikan Islam Al Mu'awanah	Jalan Raya Medali Dusun Medali RT 003/RW 001 Kecamatan Puri	1	Multimedia
32	Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Thoriquil Ulum	Jalan Hansip Nomor 1, Desa Sajen, Pacet	1	Teknik Las
33	Pondok Pesantren Rodulotul Hidayah Pakis Trowulan	Jalan Pondok Pakis Trowulan Mojokerto	1	Teknik informatika
34	Lembaga Pendidikan Islam Assalam	Depan Masjid Nurul Huda Desa Panggih, Kec. Trowulan	1	Teknik informatika
35	Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Mubtadiin	Dusun Plosorejo Desa Plososari Kecamatan Puri	1	Teknik informatika
36	Pondok Pesantren Darul Hikam	Dusun Tambaksuruh Desa Tambakagung, Puri	1	Teknik informatika
37	Yayasan Pondok Pesantren Kun Aliman	Jalan Pesantren Desa Mojogeneng Kec. Jatirejo	1	Teknik informatika

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2024 didapatkan sebanyak 21 Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Perusahaan dan 37 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta serta BLK Komunitas di wilayah Kabupaten Mojokerto yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja memiliki kelembagaan dalam pelaksanaan Pelatihan kerja dan Pemagangan dalam Negeri dan keseluruhan jenis pelatihannya di sektor Industri Pengelohan, permesinan dan manufacturing.

3. Indikator Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan

Pelaksana indikator Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial adalah Bidang Hubungan Industrial. Permasalahan hubungan industrial masih menjadi tugas utama Dinas Tenaga Kerja dalam menciptakan kondisi kerja yang harmonis, dinamis, kondusif untuk ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja dan berinvestasi bagi para pelaku industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu Pengusaha dan Pekerja/serikat pekerja dan/atau serikat buruh.

Target kinerja untuk indikator ini pada akhir tahun 2024. sebesar 3,5%, dan capaiannya melebihi target yaitu 1,50%. Indikator kinerja ini sesuai Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani meliputi 4 (empat) jenis perselisihan, yaitu:

- Perselisihan Hak;
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Perselisihan Kepentingan dan;
- Perselisihan antar SP/SB

Berikut ini kami lampirkan tabel data dan diagram Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Mojokerto dimana rata-rata terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja ini pada periode tahun 2021-2024 sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kasus per tahun.

Tabel

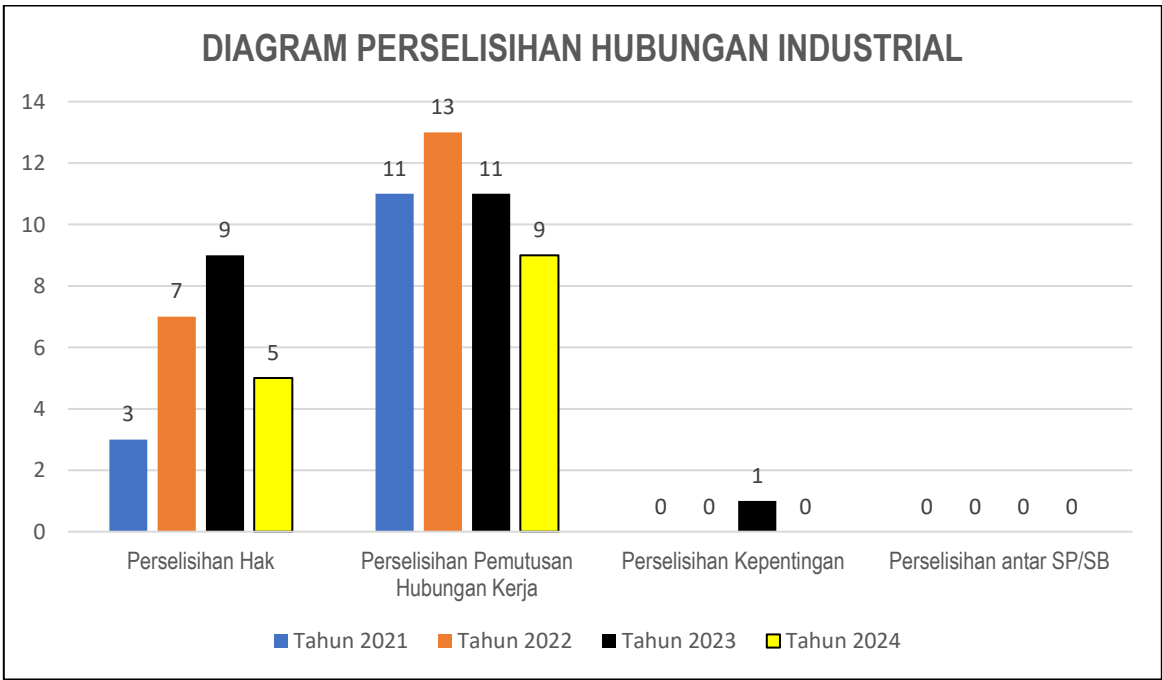
DATA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	JENIS PERSELISIHAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	PERSELISIHAN HAK	3	7	9	5
2	PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	11	13	11	9
3	PERSELISIHAN KEPENTINGAN	-	-	1	-
4	PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH	-	-	-	-
	JUMLAH	14	20	21	4

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Gambar

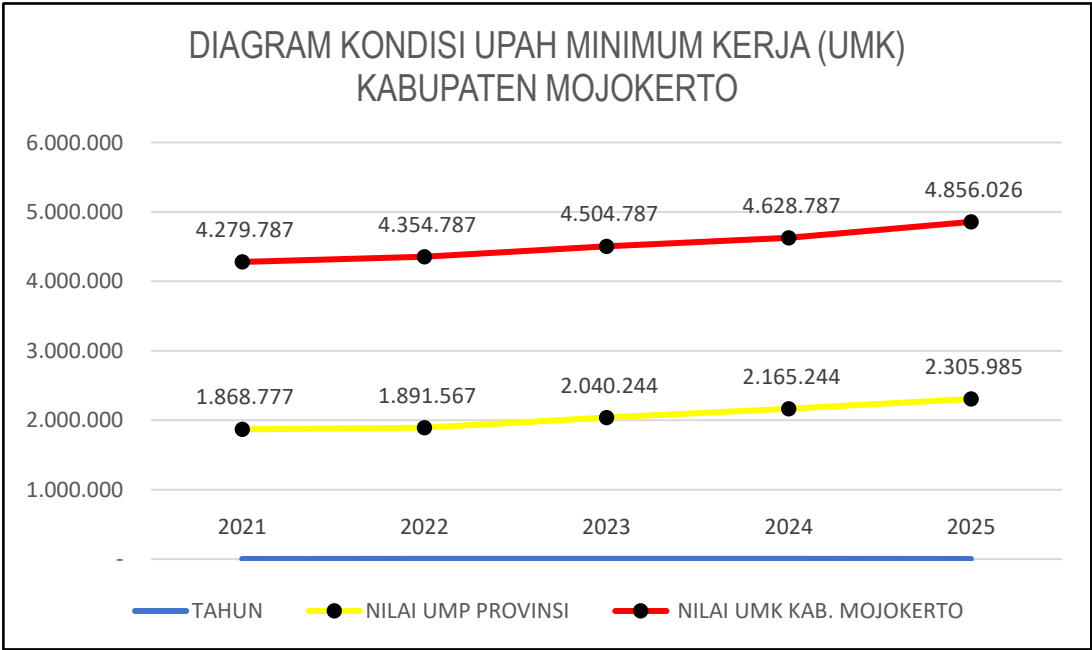
DIAGRAM KONDISI PERSELISIHAN HI KAB. MOJOKERTO



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang terbesar adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan diikuti oleh Perselisihan Hak serta Perselisihan Kepentingan. Faktor dominan penyebab terjadinya perselisihan HI-PHK tersebut salah satunya adalah dipengaruhi oleh kondisi pengupahan di Kabupaten Mojokerto selama 4 (empat) tahun terakhir dimana Upah Minimum Kab/Kota (UMK) masih menjadi perhatian utama sebagai potensi terjadinya resiko Perselisihan Hubungan Industrial, sebagian besar perusahaan beralasan masih belum mampu menerapkan regulasi pengupahan, sehingga untuk mempertahankan perusahaan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka langkah efisiensi tenaga kerja terpaksa dilakukan.

Gambar
Diagram UMK / UMR KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Upaya mewujudkan kondisi hubungan industrial yang harmonis, kondusif, dinamis dan berkeadilan juga dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial guna meningkatkan hubungan antara pengusaha dan pekerja, Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit sebagai bentuk upaya deteksi dini permasalahan hubungan industrial, Pembahasan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) melalui Dewan Pengupahan serta Sosialisasi Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Mojokerto guna menciptakan pemenuhan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Gambar

PETA SEBARAN INDUSTRI KABUPATEN MOJOKERTO

PETA WILAYAH INDUSTRI KABUPATEN MOJOKERTO		NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA
		1	BANGSAL	160	1.635
		2	DAWAR BLANDONG	150	972
		3	DLANGGU	188	487
		4	GEDEG	175	1.186
		5	GONDANG	123	1.368
		6	JATIREJO	111	164
		7	JETIS	269	6.568
		8	KEMLAGI	156	1.042
		9	KUTOREJO	185	2.955
		10	MOJOANYAR	174	825
		11	MOJOSARI	347	1.661
		12	NGORO	479	71.631
		13	PACET	166	196
		14	PUNGGING	280	6.498
		15	PURI	309	3.392
		16	SOOKO	363	1.773
		17	TRAWAS	107	120
		18	TROWULAN	201	1.440
			TOTAL	3.943	103.913

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur (Kondisi Tahun 2024)

Pada peta sebaran industri diatas, daerah dominan industri ada pada daerah Kecamatan Ngoro dengan lokasi ideal sebagai lokasi industri yaitu Ngoro Industrial Persada (NIP) dimana terdapat perusahaan sebanyak 479 Perusahaan yang sektornya dominan di sektor industri pengolahan.

4. Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial

Pelaksana indikator ini adalah bidang perlindungan dan keselamatan kerja. Permasalahan perlindungan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan utama berkelanjutan pada Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan pekerja perempuan dan anak, pembinaan fasilitas sarana dan prasarana kerja, serta peningkatan perlindungan pekerja rentan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Berikut ini adalah tabel kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari tugas, pokok dan fungsi Bidang pelaksana selama kurun waktu Tahun 2021-2024 :

Tabel

*KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	JUMLAH PENDUDUK BEKERJA (Orang)	JUMLAH TENAGA KERJA TERDAFTAR BPJS KETENAGAKERJAAN	COVERAGE (%)	TAHUN
	460.045	132.272	28.75	2021
	472.578	151.658	32.09	2022
	486.404	162.971	33.51	2023

NO	JUMLAH PENDUDUK BEKERJA (Orang)	JUMLAH TENAGA KERJA TERDAFTAR BPJS KETENAGAKERJAAN	COVERAGE (%)	TAHUN
	486.404	189.013	38,09	2024

Sumber data : Website BPJS Ketenagakerjaan <https://lookerstudio.google.com> (data per akhir tahun 2024) ditambahkan perbandingan data bpjs tahun 21-23

Pada tabel diatas didapatkan bahwa dari Jumlah penduduk yang bekerja di wilayah Kabupaten Mojokerto pada periode tahun 2024 sebanyak 486.404 Orang, sedangkan tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebesar 189.013 Orang, sehingga diketahui penduduk bekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 38,09%, Tugas Perlindungan ketenagakerjaan ini tentunya menjadi perhatian bersama antara pemangku kepentingan dan stakeholder pelaksana urusan tersebut yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan upaya-upaya yang komprehensif dan berkesinambungan, agar nantinya di tahun-tahun mendatang persentase (coverage) perlindungan tenaga kerja dapat lebih meningkat lagi. Hambatan dan kendala pelaksanaan indikator ini terkait perihal sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat.

Pelaksanaan kegiatan utama selain urusan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pekerja perempuan dan anak di perusahaan, selama periode tahun 2021-2024, beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto telah mendapatkan pembinaan tersebut, sesuai tabel antara lain :

Tabel
JUMLAH PESERTA PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN PEKERJA PEREMPUAN DAN ANAK DI PERUSAHAAN

NO	JUMLAH PESERTA	SATUAN	KET
1	60	Perusahaan	2021
2	40	Perusahaan	2022
3	40	Perusahaan	2023
4	45	Perusahaan	2024
TOTAL	185	Perusahaan	

Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penggunaan pekerja perempuan dan anak di perusahaan, sehingga dampak outcome yang ingin dicapai nantinya, agar perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto memahami dan melaksanakan aturan yang berlaku. Selain itu kegiatan ini merupakan salah satu indikator penilaian Kabupaten Sehat, Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Peduli HAM.

Kegiatan berikutnya yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama ini adalah pembinaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tabel di bawah ini terinci pelaksanaannya pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel			
JUMLAH PESERTA PEMBINAAN, PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
NO	JUMLAH PESERTA	SATUAN	KET
1	60	Perusahaan	2021
2	40	Perusahaan	2022
3	40	Perusahaan	2023
4	80	Perusahaan	2024
TOTAL	220	Perusahaan	

Kegiatan pembinaan peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya resiko terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan, menekan angka kecelakaan kerja di serta diharapkan bisa mendukung indikator penilaian K3 award antara lain zero accident, pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, serta penerapan SMK3 (Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Secara keseluruhan Perincian kinerja pelayanan PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dari 4 (empat) Indikator kinerja utama, terkait sasaran dan target Renstra penganggaran perangkat daerah periode tahun 2021-2024 dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
TAHUN 2021-2026 (2021 – 2024)

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REA LISA SI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.235.610.280	5.501.889.007	5.615.629.609	5.121.614.600	5.259.052.600	3.456.264.080	3.965.653.592	4.871.438.870	4.450.721.897	4.407.542.371	0,82	72,08	86,75	86,90	83,81	7,48	3,58
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	72.497.300	-	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	(100,00)	(100,00)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	184.740.700	718.370.000	1.135.000.000	1.223.100.000	760.284.340	174.940.900	451.593.650	-	1.021.971.050	716.968.800	94,70	62,86	0,00	83,56	94,30	60,25	16,66
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	98.812.300	606.813.184	256.280.000	329.350.000	340.000.000	70.692.500	390.180.639	234.342.892	307.257.454	304.241.604	71,54	64,30	91,44	93,29	89,48	50,97	(7,96)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	217.389.200	810.061.450	385.000.000	1.897.075.800	4.200.749.900	111.162.500	682.077.600	376.706.150	1.849.982.100	4.156.276.250	51,14	84,20	97,85	97,52	98,94	168,35	82,65
JUMLAH APBD	4.736.552.480	7.637.133.641	7.391.909.609	8.646.140.400	10.560.086.840	3.813.059.980	5.489.505.481	5.482.487.912	7.702.429.801	9.585.029.025	80,50	71,88	74,17	89,09	90,77	11,41	20,42

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto (data per akhir tahun 2024)

Pada tabel anggaran dan realisasi pendanaan, secara rata-rata pencapaian realisasi hanya selisih kurang dari 20% dari target finalisasi per tahun. Hal ini masih dapat dimaklumi karena hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan yang terjadi di lapangan berdasar kondisi-kondisi yang dapat berubah-ubah. Namun yang perlu diperhatikan adalah target dan realisasi pada tahun 2021, dimana pencapaian realisasi anggaran adalah yang terendah selama periode 2021-2024. Yaitu sebesar 71,8%. Beberapa faktor penyebab adalah antara lain :

- a. Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah saat terjadinya dampak pandemi covid 19, sedangkan pada pertengahan tahun 2021 adalah masa dimulainya transisi menuju pemulihan pasca covid-19, sehingga beberapa anggaran masih dilakukan kebijakan refocusing untuk pengalokasian peningkatan upaya kesehatan di masyarakat;
- b. Perlu diketahui bersama bahwa beberapa pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagian besar adalah berupa pembinaan, sosialisasi serta Monitoring dan Evaluasi dengan metode tatap muka (contoh Job Fair, Pemberdayaan masyarakat dan/atau pencari kerja, serta Pelatihan Kerja kompetensi) terkendala oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, mengakibatkan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran dan penciptaan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan kondusif tidak dapat dilaksanakan optimal;
- c. dari sisa anggaran yang tersedia mengakibatkan sedikitnya opsi untuk dilakukan penyesuaian, perubahan maupun pergeseran anggaran untuk pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sehingga berdampak pada pencapaian kinerja di tahun tersebut.

5. Kinerja pelayanan publik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

Kinerja pelayanan publik yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (PD) sebagai leading sektor pembangunan ketenagakerjaan yang juga berkontribusi pada urusan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2024, seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diperoleh adalah dari Rekomendasi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2024 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel				
CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
IJIN MEMPERGUNAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO				
NO	TARGET PAD	REALISASI PAD	% CAPAIAN	TAHUN
1	1.057.000.000	1.343.948.400	127,14	2022
2	2.585.347.200	3.281.058.100	126,90	2023
3	3.000.000,000,-	4.063.097.600,-	135,44	2024

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto (data per akhir tahun 2024) kurang data perbandingan 22-24

1.D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pelayanan, fasilitasi pembinaan, pelatihan kerja, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan penanganan perselisihan hubungan industrial memiliki stakeholder yang memiliki kepentingan dalam tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Kelompok sasaran dan mitra pelayanan tersebut antara lain :

Tabel				
STAKEHOLDER DAN KELOMPOK SASARAN PELAYANAN				
NO	BIDANG PELAKSANA	STAKEHOLDER / MITRA	KELOMPOK SASARAN	JENIS LAYANAN
1	Bidang Pelatihan	Disnaker, Dinkop Um, Disperindag, Dinkes, Dispari, Disperta, Dinsos, Dinas Pariwisata, Dpupr, LPK, BLK Komunitas, Dinas Pendidikan	Masyarakat dan/ atau pencari kerja	Pelatihan Kerja
2	Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker Prov. Jatim, Dinkop UM, Disperindag, Dinkes, Dispari, Disperta, Dinsos, Disparpora, BKK, Bapenda kab. Mojokerto, Kantor Imigrasi, P3MI	Masyarakat dan/ atau pencari kerja	Penerbitan Kartu AK-1, Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi Transmigrasi
			Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pelayanan perpanjangan IMTA
			Masyarakat dan/ atau pencari kerja	Pelayanan CPMI
3	Bidang Hubungan Industrial	Bakesbangpol, Bpjs Ketenagakerjaan, Polres, Serikat Pekerja, Apindo, Bappeda, Bag	Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Perusahaan	Pelayanan Penyelesaian perselisihan HI, Pelayanan Pencatatan SP/SB
4	Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja	Perekonomian, Disperindag, Dinkop Um, Bps, Akademisi Univ, Disnaker Provinsi Jawa Timur BPJS Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Perusahaan wilayah Kab. Mojokerto	Pembinaan perlindungan Ketenagakerjaan, Monev Keselamatan dan Kesehatan kerja

Tantangan dan peluang dalam pelayanan publik pada kelompok sasaran di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, antara lain :

1. Tantangan Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

- Tantangan utama adalah Sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto untuk selalu update dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar bisa memberikan pelayanan yang mudah dan baik kepada masyarakat;
- Kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang sewaktu-waktu dapat berubah dinamis dan harus segera ditindak lanjuti secara cepat dan taktis pada level Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kab/Kota, karena dapat mempengaruhi iklim hubungan industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- Dampak dari setelah terjadinya pandemi covid 19 juga dapat menjadi tantangan dalam perencanaan dan penganggaran di masa-masa mendatang, dalam hal inovasi dan pengaplikasian sarana digital dalam pelayanan harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas, keahlian dan kemampuan sumber daya manusianya.

2. Peluang Pengembangan Layanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

- Pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada masa-masa mendatang dititik beratkan pada Inovasi dan perbaikan sistem kerja yang profesional dan lebih terkoordinasi serta termonitoring dan terevaluasi baik secara digitalisasi dan pengembangan Informasi Teknologi;
- Langkah selanjutnya adalah pengembangan akses peluang pelayanan dibidang ketenagakerjaan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dengan bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja, BKK, LPK sehingga peningkatan kemampuan dan keahlian kerja bagi masyarakat dan pencari kerja dapat meningkat signifikan.

II. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II. A. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan ketanagakerjaan di daerah Kabupaten Mojokerto diperlukan proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Pembangunan memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi disparitas/ ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam secara Berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, namun pencapaian keberhasilannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Jalannya roda pembangunan di Kabupaten Mojokerto tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Pemahaman terhadap problem lingkungan strategis diharapkan dapat memberikan penekanan dan menajamkan isu-isu sekaligus menawarkan solusi strategis terkait dengan sasaran dan program prioritas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya yang terkait dengan problem ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Kabupaten yang jumlah angkatan kerjanya cukup besar. Melansir data Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2024 angkatan kerja berjumlah 671.806 orang. Dari angkatan kerja yang ada, penduduk yang bekerja sebanyak 645.825 orang, sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebanyak 22.159 orang. Dengan demikian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 menjadi 3,87%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi di tahun 2023, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,67%.

Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Mojokerto adalah angka pengangguran, yang antara lain disebabkan :

- a. Masih tingginya angka pengangguran
- b. Masih tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. Masih lemahnya perlindungan dan fasilitasi calon pekerja migran/ pekerja migran Indonesia;
- d. Kurangnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi.

Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama dikalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula kecenderungan pengangguran dikalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas karena adanya kekurangsesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan ketrampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15-19, [berdasarkan pada informasi dan hasil pelaporan dari International Labour Organization \(ILO\) pada tahun 2024 dengan judul “Global Employment Trends For Youth” mengenai trend pengangguran usia muda \(sebagai referensi\) untuk di wilayah asia tenggara dan pasifik termasuk negara Indonesia mengalami peningkatan tingkat pengangguran usia muda dibandingkan sejak tahun 2019. Sehingga Indonesia umumnya dan wilayah Kabupaten Mojokerto khususnya harus bersiap-siap menghadapi bonus demografi pada tahun mendatang dengan opsi dan pengambilan langkah-langkah kebijakan strategis dalam penanganan permasalahan tersebut.](#)

Kualitas SDM akan menjadi tantangan utama dalam persaingan global. Kualifikasi SDM yang relatif rendah tingkat pendidikan dan keterampilannya mengakibatkan rendahnya produktivitas yang pada gilirannya mempengaruhi daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan dan persaingan pasar kerja global yang membutuhkan tenaga kerja profesional.

Disamping itu semakin berkembangnya penerapan teknologi juga mempengaruhi sektor industri pengolahan/ manufaktur, karena saat ini harus bersiap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri keempat, konsekuensinya, diperlukan pendekatan dan kemampuan baru untuk membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan. Revolusi industri 4.0 adalah gabungan manufaktur dengan kecerdasan taktis yang memanfaatkan internet dan teknologi pendukung untuk mencapai tujuan fleksibilitas, efisiensi dan efektifitas, dan apabila tidak dipersiapkan juga dari sisi penggunaan Sumber Daya Manusia

yang memadai maka tidak akan bisa optimal didalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

II.B. ISU STRATEGIS

Permasalahan yang terdapat pada pelayanan perangkat daerah menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan, dan jika dihubungkan dengan RPJMN 2025-2029 yaitu penguatan fondasi transformasi meliputi antara lain :

1. Transformasi Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan Sosial

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi Sumber daya alam serta penguatan riset dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasipelayanan public, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketahanan diplomasi

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat keatahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

RPJMD Teknokratik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 mengacu pada visi Indonesia Emas 2025-2045 yaitu: “Negara Nusantara, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, Visi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pada level pemerintahan daerah Kab/Kota (RPJMD) dan juga sebagai dasar penentuan menghadapi isu-isu strategis permasalahan perangkat daerah, maka sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, dengan penetapan visi dan misi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan ketenagakerjaan di daerah. Pada hakikatnya dengan terbentuknya visi Kepala Daerah berpengaruh terhadap organisasi perangkat daerah yaitu adalah dengan menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi dan misi adalah mental model

masa depan, dengan demikian visi dan misi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi dan misi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi dan misi tersebut. Visi dan misi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

== CATUR ABHIPRAYA MUBAROK ==	
VISI	<i>“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”</i>
MISI 1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik
MISI 2	Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat;
MISI 3	Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;
MISI 4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan ke empat misi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto melaksanakan Misi ke 3 (tiga) yaitu **Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.**

Implementasi pelaksanaan dari Misi ke 3 (tiga), tercermin pada peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yaitu : Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang pilihan urusan transmigrasi.

Dengan mengetahui gambaran permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk urusan ketenagakerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sesuai PD yang bertanggungjawab dibidangnya merumuskan isu-isu strategis yang antara lain, sebagai berikut ini

TABEL 2.1
TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi; 2. Fasilitasi Pelayanan Kartu (AK/1) untuk pencari kerja; 3. Program Perlindungan Tenaga Kerja; 4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan; 5. Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja: Memberdayakan lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 6. Program Fasilitasi Calon Transmigran	1. Masih tingginya angka pengangguran; 2. Masih tingginya perselisihan Hubungan Industrial; 3. Lemahnya perlindungan tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan; 4. Masih lemahnya perlindungan dan fasilitasi calon pekerja migran; 5. Belum optimalnya pelaksanaan program transmigrasi sebagai upaya penempatan tenaga kerja	1. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian; 2. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya; 3. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan; 4. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1. Pengangguran dan Ketidakpastian Pekerjaan; 2. Automasi dan Kecerdasan Buatan; 3. Kesenjangan Gender dan Diskriminasi; 4. Upah Layak dan Kondisi Kerja; 5. Migrasi Tenaga Kerja; 6. Green Jobs dan Transisi Energi; 7. Ketidakpastian Ekonomi Global; 8. Pendidikan dan Keterampilan	1. Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan Informal; 2. Kualitas SDM dan Ketidakesuaian Keterampilan (Skill Mismatch); 3. Upah Minimum dan Kesejahteraan Pekerja; 4. Kontroversi UU Cipta Kerja (Omnibus Law); 5. Pekerja Migran Indonesia (PMI); 6. Isu Gender dalam Dunia Kerja; 7. Pekerjaan Layak dan Transisi Hijau; 8. Digitalisasi dan Masa Depan Pekerjaan	1. Dominasi Tenaga Kerja di Sektor Informal; 2. Kesenjangan Keterampilan dan Pendidikan; 3. Upah Minimum dan Kesenjangan Antar Daerah; 4. Perlindungan Buruh Pabrik; 5. Pekerja Migran dan TKI; 6. Ketimpangan Gender dan Pekerjaan Perempuan; 7. Dampak Urbanisasi dan Pengangguran Kaum Muda	1. Menurunkan angka pengangguran; 2. Menurunkan angka perselisihan hubungan industrial; 3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan tersedianya fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan; 4. Meningkatkan perlindungan dan fasilitasi calon pekerja migran; 5. Meningkatkan pelaksanaan pemberangkatan calon transmigran Kabupaten Mojokerto

Pengelompokan kriteria dari permasalahan perangkat daerah pada tabel diatas antara lain adalah :

1. Masih tingginya Angka Pengangguran

Angka Pengangguran masih menjadi isu strategis nasional sampai dengan saat ini, target pemerintah pusat sampai dengan tahun 2024 adalah TPT bisa turun dibawah angka 4%, namun pencapaiannya berada diangka 4,91%. Kondisi Tingkat pengangguran Terbuka di wilayah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi penurunan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan persentase TPT sebesar 3,87%. terjadi penurunan sebesar 0,8% dari Tahun 2023 dengan angka TPT sebesar 4,67%. Maka dari permasalahan tersebut diatas, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi kriteria permasalahan utama yang menjadi Fokus pelaksanaan Pembangunan Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto, dikarenakan belum optimalnya masyarakat dan/atau pencari kerja yang memiliki kemampuan dan keahlian kerja yang terkompetensi agar berdaya saing tinggi di pasar kerja dan kurangnya akses serta kesempatan dan penempatan tenaga kerja.

2. Masih tingginya Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto

Angka Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto Masih dominan terjadi di sektor Formal dimana perbedaan pendapat sering terjadi dengan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja/ Buruh. Hal ini dikarenakan kondisi Jumlah Perusahaan yang besar belum didukung pelaksanaan Monitoring yang maksimal dari Dinas Tenaga Kerja, kondisi Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki khususnya Pegawai yang melakukan Perlindungan dan monitoring di perusahaan serta Pegawai Mediator perselisihan Hubungan Industrial yang hanya berjumlah 4 (empat) orang, sementara jumlah perusahaan di kabupaten Mojokerto sebanyak 983 Perusahaan diperlukan ekstra penanganan agar bisa tercakupi semua.

3. Lemahnya perlindungan tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan

Permasalahan belum optimalnya Perlindungan dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja/tenaga Kerja di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto dikarenakan masih banyaknya perusahaan dengan Tenaga Kerja yang dimilikinya belum memahami dan menerapkan peraturan ketenagakerjaan

secara baik, sebagai salah satu contoh adalah pemberian fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja dalam bentuk pemberian BPJS Ketenagakerjaan dimana sampai dengan tahun 2024 berdasarkan informasi pada website semesta BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kerja yang baru terlindungi jaminan sosial sebesar 38% dari jenis kategori pekerja penerima upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan Jakon (Jasa Kontruksi) di wilayah Kabupaten Mojokerto

4. *Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)*

Bahwa resiko perlindungan dan keselamatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto yang bekerja di luar negeri juga masih tinggi karena lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap PMI tersebut.

5. *Belum optimalnya pelaksanaan program fasilitasi transmigrasi sebagai upaya penempatan tenaga kerja*

Animo Masyarakat terhadap Program Transmigrasi di wilayah Kabupaten Mojokerto masih terbilang tinggi, namun ketersediaan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan pembagian kuota bergantung pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu minimnya dukungan anggaran untuk fasilitasi transmigrasi yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, bantuan permodalan bagi calon transmigrasi, juga turut memberikan dampak pada animo Masyarakat terhadap program transmigrasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA PD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2029

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pelaksanaan tujuan Organisasi Perangkat Daerah berangkat dari Sasaran dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3.2. SASARAN RENSTRA PD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2029

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yaitu penurunan angka pengangguran dan indikator tujuan PD Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan strategi meningkatkan penempatan tenaga

kerja serta meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif maka diperlukan target sasaran kinerja antara lain :

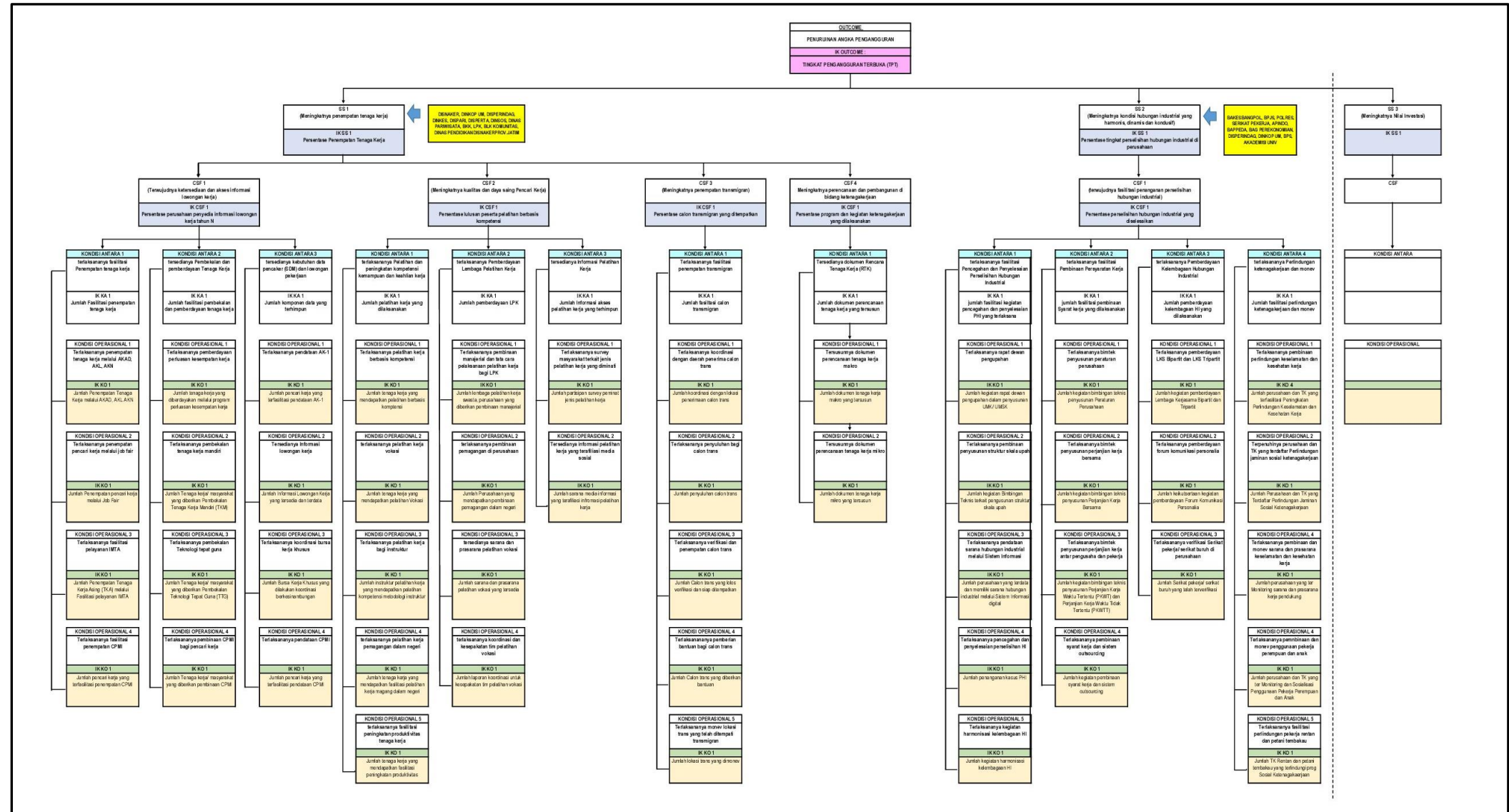
TABEL 3.3
MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meiriurunya angka pengangguran			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,15 - 3,60	4,14 - 3,42	4,13 - 3,23	4,05 - 3,09	4,00 - 3,01	3,95 - 2,96	
	Penurunan angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,15 - 3,60	4,14 - 3,42	4,13 - 3,23	4,05 - 3,09	4,00 - 3,01	3,95 - 2,96	
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	86,50%	86,75%	87%	87,25%	87,50%	88%	
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Kondusif	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,30%	1,25%	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,45 (A)	81,50 (A)	81,55 (A)	81,60 (A)	81,65 (A)	81,70 (A)	

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto telah mendesain pohon kinerja sebagai tolak ukur pembuatan cascading kinerja yang diharapkan menjadi gambaran desain keseluruhan kinerja PD yang dapat terukur dan dilaksanakan seluruh bidang teknis pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

Berikut ini adalah gambar desain pohon kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

Gambar
POHON KINERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029



3.3 SASARAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Bahwa sesuai gambaran desain pohon kinerja diatas, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Berikut ini disampaikan tahapan-tahapan penyusunan tujuan, sasaran rencana strategis perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, tahapan selanjutnya adalah merumuskan strategi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang perlu dipersiapkan adalah menjamin ketersediaan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029. Strategi dan arah kebijakan tersebut antara lain :

TABEL 3.3.1
PENYUSUNAN ARAH TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI		: TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR		
MISI 3		: MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI PADA SEMUA TINGKATAN, KOPERASI DAN UM (USAHA MIKRO) SERTA BUMDESA YANG BERBASIS MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SEJAHTERA		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA(TPT)	1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi 2. Meningkatkan minat pencari kerja melalui updating informasi jenis-jenis pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 3. Meningkatkan kerjasama aktif dengan balai latihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja perusahaan/ swasta dan umum 4. Meningkatkan peyebarluasan informasi lowongan kerja 5. Meningkatkan koordinasi dengan pemberi kerja untuk kemudahan akses perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian kerja serta kriteria persyaratan pemberi kerja 6. Meningkatkan penyuluhan pemberdayaan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru 7. Meningkatkan informasi bursa dan pasar kerja melalui jobfair	
		2. Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif	1. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial 2. Meningkatkan penanganan kasus perselisihan hi untuk mencegah phk 3. Meningkatkan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit 4. Meningkatkan monitoring prasarana dan sarana k3 di perusahaan 5. Meningkatkan kepersertaan jaminan sosial pekerja sebagai perlindungan pekerja/ buruh 6. Meningkatkan monitoring pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di perusahaan	

Langkah berikutnya dari penyusunan arah dan tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja adalah mempersiapkan penahapan pembangunan prioritas ketenagakerjaan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, penahapan tersebut antara lain :

TABEL 3.4.
PENAHAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

TUJUAN	MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN			
SASARAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			
STRATEGI	1. MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA 2. MENINGKATNYA KONDISI HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, DINAMIS DAN KONDUSIF 3. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH			
TAHAP I (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan pelatihan kerja bersertifikat kompetensi dan meningkatkan animo kepersertaan pelatihan kerja melalui survey kebutuhan dan minat pelatihan kerja di masyarakat agar nantinya masyarakat memlik kemampuan dan keahlian kerja serta berdaya saing lebih tinggi di pasar kerja	Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam penciptaan perluasan kesempatan kerja melalui pelaksanaan Job Fair yang lebih menekankan <i>link and match</i> antara pencari kerja dengan pemberi kerja	Identifikasi kebutuhan dan persediaan tenaga kerja melalui proyeksi perencanaan tenaga kerja yang terdokumentasi dan tersistematis sehingga pelaksanaan pelatihan kerja, pelaksanaan akses kesempatan dan penempatan tenaga kerja lebih tepat sasaran, tepat guna dan hasil	Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pendampingan serta sosialisasi kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan kepada pelaku usaha yaitu pengusaha, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam bekerja dan juga untuk menekan terjadinya peningkatan angka perselisihan.	Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan pada akhir periode untuk memetakan faktor penghambat/ kendala dan pendukung guna perumusan kebijakan dari sisi ketersediaan program, kegiatan dan anggaran yang mendukung penurunan angka pengangguran.

3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah dan kebijakan renstra perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra PD. Berikut ini dilampirkan tabel teknik dalam merumuskan arah kebijakan Rentra PD :

TABEL 3.5.
PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Dan Sertifikasi	
			Meningkatkan Minat Pencaker Melalui Updating Informasi Jenis- Jenis Pelatihan Kerja Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masyarakat	
			Meningkatkan Informasi Bursa Dan Pasar Kerja Melalui Jobfair	
		Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Penyediaan Infrastruktur	Meningkatkan Penyuluhan Pemberdayaan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Baru	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
			Meningkatkan upaya penempatan tenaga kerja melalui Fasilitasi Transmigrasi	
		Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten	Meningkatkan Kerjasama Aktif Dengan Balai Latihan Kerja Dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Baik Umum Dan Di Perusahaan	
		Penyediaan Keamanan, Ketertiban, dan Stabilitas	Meningkatkan Peyebarluasan Informasi Lowongan Kerja	
			Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial	
			Meningkatkan Penanganan Kasus Perselisihan HI Untuk Mencegah PHK	
		Memperkuat Ketahanan melalui Pelestarian Sosial dan Ekologi	Meningkatkan Media Jejaring Informasi Lowongan Kerja Pada Perusahaan	
			Meningkatkan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Tripartit	
			Meningkatkan Pembinaan serta monev Prasarana Dan Sarana K3 di perusahaan	
			Meningkatkan Kebersertaan Jaminan Sosial Pekerja Sebagai Perlindungan Pekerja/ Buruh	
			Meningkatkan pembinaan serta monev Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan Di Perusahaan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, program prioritas dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang kemudian dijadikan komitmen strategi dan kebijakan perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan kinerja organisasi dimaksud agar dapat tepat sasaran, tepat guna dan hasil maka perlu memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan;
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

4.1. URAIAN PROGRAM

Program ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja yang layak dan produktif. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan utama di sektor ketenagakerjaan, seperti

tingginya tingkat pengangguran, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi pencari kerja:

Adapun fokus utama dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan meliputi:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, bekerjasama aktif dengan UPT dan Balai Latihan Kerja (BLK) serta kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja, terutama di sektor-sektor prioritas seperti industri kreatif, teknologi informasi, manufaktur, dan pertanian modern;

2. Program penempatan tenaga kerja

Program penempatan tenaga kerja merupakan salah satu strategi utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto di dalam upaya mengatasi pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menjembatani antara pencari kerja dengan dunia usaha dan industri melalui mekanisme yang transparan, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Penempatan tenaga kerja dilakukan melalui berbagai jalur, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan memastikan bahwa setiap pekerja yang ditempatkan memiliki kompetensi, kesiapan, dan perlindungan yang memadai. Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup beberapa komponen utama:

3. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial merupakan bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, program ini bertujuan menciptakan iklim kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan industrial yang sehat menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas, perlindungan hak-hak tenaga kerja, serta keberlangsungan usaha. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif dan adil

4. Program pembangunan kawasan transmigrasi

Program transmigrasi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan kepadatan penduduk. Melalui program ini, masyarakat dari daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dipindahkan secara sukarela ke wilayah-wilayah baru yang memiliki potensi sumber daya

alam, namun masih kurang penduduk dan belum berkembang secara optimal.

5. Program perencanaan tenaga kerja (makro)

Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro merupakan salah satu langkah inisiatif strategis dalam rangka mengelola dan mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan di tingkat nasional. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dengan memperhatikan dinamika demografi, perkembangan sektor ekonomi, kemajuan teknologi, serta kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

Melalui pendekatan makro, perencanaan tenaga kerja tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga mencakup kualitas, distribusi, serta kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global dan regional, seperti transformasi digital, revolusi industri 4.0, dan perubahan iklim. Program ini mencakup kegiatan pemetaan kebutuhan tenaga kerja nasional, analisis tren ketenagakerjaan jangka panjang, serta pengembangan skenario kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data

4.2. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan ketenagakerjaan merupakan rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi tingkat pengangguran. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, serta masyarakat umum, khususnya para pencari kerja dan angkatan kerja muda.

Berbagai contoh bentuk kegiatan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang mendukung penurunan angka pengangguran antara lain:

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Pelatihan kerja diberikan kepada individu dan/ atau pencari kerja yang belum memiliki keterampilan atau ingin meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti teknologi informasi, otomotif, tata boga, dan penggunaan alat berat. Tujuannya agar peserta mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

2. Pemagangan dalam negeri

Pemagangan dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja. Program dilakukan melalui kerja sama dengan

perusahaan yang telah terdaftar dan tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, efektifitas kegiatan ini adalah pada penyerapan tenaga kerja tetap dan langsung

3. Pameran bursa kerja / Job Fair

Kegiatan ini mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan kerja (link and match). Sampai dengan saat ini bentuk pelaksanaan job fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah secara tatap muka, ke depan diharapkan agar mempercepat dan mempermudah proses tersebut kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring (online), dan menjadi sarana efektif untuk penempatan kerja secara langsung

4. Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menciptakan iklim kerja yang harmonis, adil, dan produktif antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan berperan aktif untuk mengedukasi kedua belah pihak, serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di tempat kerja

5. Kegiatan fasilitasi transmigrasi

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur, instansi terkait, dan lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dimulai dengan tahap persiapan, yang melibatkan pemetaan daerah tujuan transmigrasi, identifikasi potensi lahan, serta penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti rumah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya.

Perumusan Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, dimaksud diuraikan pada Tabel berikut ini :

TABEL 4.2.
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Menurunnya angka pengangguran				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan / Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja			Persentase Penempatan Tenaga Kerja		
			Meningkatnya Masyarakat/ Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian Dan Kemampuan Kerja		Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
						Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
				Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Meningkatnya Kualitas Produktivitas Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
						Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			Meningkatnya akses kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja		Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	
						Pelayanan Antar Kerja	
						Perluasan Kesempatan Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
						Job Fair / Bursa Kerja	
				Meningkatnya Perlindungan PMI Kabupaten Mojokerto	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Meningkatnya Administrasi Penerbitan Perpanjangan Imita Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitas penerbitan perpanjangan IMTA yang tercapai sesuai target	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
						Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	
			Meningkatnya Penempatan Transmigran		Persentase calon transmigran yang ditempatkan	Program pembangunan kawasan transmigrasi	
				Meningkatnya penataan persebaran penduduk dari daerah asal ke daerah penerima trans	Persentase kegiatan fasilitas Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyuluhan Transmigrasi	
						Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	
						Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
			Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro di bidang Ketenagakerjaan		Persentase Prog Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
				Optimalisasi Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan yang sistematis	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif			Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menurunnya Angka Perselisihan Hubungan Industrial		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Program Hubungan Industrial	
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		
				Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Persentase fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercapai sesuai target	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
						Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
				Meningkatnya Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	
						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

4.3. URAIAN SUB KEGIATAN, KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Berdasarkan pada tabel diatas, didapatkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto melaksanakan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan, kemudian di level Sasaran terdapat 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Sementara itu untuk di level program terdiri dari 5 (lima) program dan 6 (enam) indikator program. Sedangkan pada level kegiatan/ sub kegiatan terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu periode tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis yang disusun.

Setelah tahapan merumuskan program/ kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, langkah berikutnya adalah menyusun rencana program/ kegiatan/ dan sub kegiatan dengan diberikan jumlah penganggaran yang dibutuhkan pada kondisi ideal PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan program-program pembangunan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto, berikut ini adalah tabel perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan disertai kebutuhan penganggarnya :

TABEL 4.3.
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.806.735.392		12.007.707.377		11.977.195.399		12.185.297.584		12.124.844.923		
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,76	4,15 - 3,60	4,14 - 3,42		4,13 - 3,23		4,05 - 3,09		4,00 - 3,01		3,95 - 2,96			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,30 (A)	81,45 (A)	81,50 (A)		81,55 (A)		81,60 (A)		81,65 (A)		81,70 (A)			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					6.210.985.492		6.311.957.477		6.381.445.499		6.489.547.684		6.529.095.023		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	88,25	90	90	6.210.985.492	90	6.311.957.477	90	6.381.445.499	90	6.489.547.684	90	6.529.095.023		
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00%	90,80%	90,81%		90,82%		90,83%		90,84%		90,85%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%	90%	90%	47.500.000	90%	47.500.000	90%	47.500.000	90%	47.500.000	90%	47.500.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.533.885.492		5.621.257.477		5.635.745.499		5.779.247.684		5.853.795.023		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	5.533.885.492	100%	5.621.257.477	100%	5.635.745.499	100%	5.779.247.684	100%	5.853.795.023		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 org/bln	33 org/bln	33 org/bln	5.529.570.182	33 org/bln	5.616.640.095	33 org/bln	5.630.804.901	33 org/bln	5.773.961.244	33 org/bln	5.848.138.532		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.315.310	1 dokumen	4.617.382	1 dokumen	4.940.598	1 dokumen	5.286.440	1 dokumen	5.656.491		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000				
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	86,15	86,16	35.000.000	86,17	35.000.000	86,18	35.000.000	86,19	35.000.000	86,20			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokume n	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					194.900.000		194.900.000		197.900.000		202.900.000		202.900.000		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	65.000.000	6 Paket	65.000.000	6 Paket	65.000.000	6 Paket	70.000.000	6 Paket	70.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	100%	129.900.000	100%	129.900.000	100%	132.900.000	100%	132.900.000	100%	132.900.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	8 Paket	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000	8 Paket	14.400.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	27.000.000	11 Paket	27.000.000	11 Paket	30.000.000	11 Paket	30.000.000	11 Paket	30.000.000		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000	150 Laporan	63.500.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah					238.200.000		247.800.000		247.800.000		257.400.000		257.400.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	100%	238.200.000	100%	247.800.000	100%	247.800.000	100%	257.400.000	100%	257.400.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	163.200.000	12 Laporan	172.800.000	12 Laporan	172.800.000	12 Laporan	182.400.000	12 Laporan	182.400.000		
Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemeruintah Daerah					161.500.000		165.500.000		217.500.000		167.500.000		167.500.000		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	100%	161.500.000	100%	165.500.000	100%	217.500.000	100%	167.500.000	100%	167.500.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	86.000.000	6 Unit	90.000.000	6 Unit	90.000.000	6 Unit	90.000.000	6 Unit	90.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	1 unit	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	18 Unit	31 Unit	31 Unit	25.500.000	31 Unit	25.500.000	31 Unit	27.500.000	31 Unit	27.500.000	31 Unit	27.500.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	86,21%	86,50%	86,75%		87%		87,25%		87,50%		88%			
Program perencanaan tenaga kerja					50.000.000		150.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro di bidang Ketenagakerjaan	Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja		100%	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					50.000.000		150.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		
Tersedianya dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		2 Dokume n	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokume n	150.000.000	1 Dokume n	50.000.000	2 Dokume n	150.000.000	1 Dokume n	50.000.000		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokume n			1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000				
Fasilitasi Penyusunan RencanaTenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		1 Orang	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000		
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja					775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000		
Meningkatnya Masyarakat/ Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian Dan Kemampuan Kerja	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	89,60%	92%	92,5%	775.000.000	93%	775.000.000	93,5%	775.000.000	94%	775.000.000	95%	775.000.000		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					695.000.000		695.000.000		695.000.000		695.000.000		695.000.000		
Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	48 Orang	96 Orang	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000	96 Orang	695.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	80 Orang	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000	80 Orang	500.000.000		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	24 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000	16 Lembaga	30.000.000		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	0 Orang	16 Orang	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000	16 Orang	100.000.000		
Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	0 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Kesepaka tan	1 Kesepak atan	1 Kesepaka tan	40.000.000	1 Kesepaka tan	40.000.000	1 Kesepaka tan	40.000.000	1 Kesepaka tan	40.000.000	1 Kesepaka tan	40.000.000		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	0 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000	10 Lembaga	30.000.000		
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Kualitas Produktivitas Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 Perusah aan	4 Perusah aan	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET		
			2025			2026		2027		2028		2029			2030	
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0 Perusaha an	4 Perusah aan	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000	4 Perusaha an	50.000.000			
Program penempatan tenaga kerja					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000			
Meningkatnya akses kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	15,50%	16,0%	16,5%	275.000.000	17%	275.000.000	17,5%	275.000.000	18%	275.000.000	19%	275.000.000			
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000			
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000			
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1 Orang	25 Orang	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	20.000.000			
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	50 Orang	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000			
Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000			
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Meningkatnya Perlindungan PMI Kabupaten Mojokerto	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	35 Orang	35 Orang	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	35 Orang	35 Orang	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000		
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					-		-		-		-		-		
Meningkatnya Administrasi Penerbitan Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi penerbitan perpanjangan IMTA yang tercapai sesuai target		100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Yang Divalidasi	0 SKRD	0 SKRD	0 SKRD	-	0 SKRD	-	0 SKRD	-	0 SKRD	-	0 SKRD	-		
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	1,50%	1,50%	1,45%		1,40%		1,35%		1,30%		1,25%			
Program hubungan industrial					4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900		
Menurunnya Angka Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	85,71%	86%	86,50%	4.495.749.900	87%	4.495.749.900	87,50%	4.495.749.900	88%	4.495.749.900	89%	4.495.749.900		
	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7%	11,7%	35%		35,5%		36%		36,5%		37%			
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Persentase fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercapai sesuai target		100%	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000		
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		20 Perusahaan	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000		
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		20 Perusahaan	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000	20 Perusahaan	35.000.000		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota					4.425.749.900		4.425.749.900		4.425.749.900		4.425.749.900		4.425.749.900		
Meningkatnya Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900	100%	4.425.749.900		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20 Perkara	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000	20 Perkara	350.000.000		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	20 Perkara	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000	20 Perkara	50.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000		
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	27930 Orang	27940 Orang	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900	27940 Orang	3.925.749.900		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	86,21%	86,50%	86,75%		87%		87,25%		87,50%		88%			
Program pembangunan kawasan transmigrasi					195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
Meningkatnya Penempatan Transmigran	Persentase calon transmigran yang ditempatkan			100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
Meningkatnya penataan persebaran penduduk dari daerah asal ke daerah penerima trans	Persentase kegiatan fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target			100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000		
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan			1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000	1 Kepala Keluarga	50.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000	15 Kepala Keluarga	30.000.000		
Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran			3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000	3 Paket	45.000.000		
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi			1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000	1 Lokasi	30.000.000		
JUMLAH					12.001.735.392		12.202.707.377		12.172.195.399		12.380.297.584		12.319.844.923		

4.4. URAIAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain adalah :

TABEL 4.4.
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Peningkatan Kualitas daya saing Tenaga Kerja dan Akses Kesempatan Kerja (Pelatihan Kerja Kompetensi, Vokasi dan pameran bursa kerja)
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	Program Penempatan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja	
			Perluasan Kesempatan Kerja	
			Job Fair/ Bursa Kerja	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PD

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah sebagai pedoman dalam

pencapaian kinerja pemerintah, Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto antara lain adalah :

TABEL 4.5.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,76	4,15 - 3,60	4,14 - 3,42	4,13 - 3,23	4,05 - 3,09	4,00 - 3,01	3,95 - 2,96	Indikator Pemerintah Daerah
	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	86,21	86,50	86,75	87	87,25	87,50	88	Indikator Perangkat Daerah
	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	%	3%	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25	Indikator Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.30	81.45	81.50	81.55	81.60	81.65	81.70	Indikator Perangkat Daerah

4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator selain indikator kinerja utama perangkat daerah yang mendukung langsung pencapaian kinerja visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 dan dipergunakan sebagai keselerasan dengan indikator pada level Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah antara lain :

TABEL 4.6.
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	99,11	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%		100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	11,59	12	13	14	15	16	17	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	86,21	88	89	90	91	92	92	
	Nilai IGA Perangkat Daerah	Nilai	TDD	85	86	87	88	89	90	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)									
	ASPEK KESEJAHTERAAN DAERAH									
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			40,24	42,18	45,36	47,30	50,48	52,76	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			74,82	75,87	76,93	77,98	79,03	80,08	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			61,38	61,88	62,38	62,88	63,39	63,89	

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2029;
2. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di wilayah Kabupaten Mojokerto, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini agar dapat mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto secara tepat sasaran, tepat hasil dan tepat guna.